

STATISTIK KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN

2015/2016

<http://seussel.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**STATISTIK KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

2015/2016

<http://suisel.bps.go.id>



**STATISTIK KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2015/2016**

ISBN	: 978.602.6426.33.8
Nomor Publikasi	: 73540.1706
Katalog BPS	: 7203007.73
Ukuran Buku	: 29 cm x 21 cm
Jumlah Halaman	: vii + 45
Naskah	: Bidang Distribusi
Gambar Kulit	: Bidang Distribusi
Diterbitkan oleh	: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan
Dicetak oleh	: © Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015/2016 merupakan hasil pengolahan dari Survei Keuangan Daerah Tingkat II (K2) yang dikumpulkan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

Publikasi ini merupakan kelanjutan dari terbitan sebelumnya yang menyajikan data realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2015 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota tahun 2016.

Disadari bahwa publikasi ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pengguna data sangat diharapkan guna perbaikan publikasi ini di masa mendatang.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Makassar, Agustus 2017

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

K e p a l a,

NURSAM SALAM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
II. SUMBER DATA	1
III. KONSEP DAN DEFINISI	2
IV. ULASAN SINGKAT	12
LAMPIRAN	17

DAFTAR TABEL

Tabel A	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 – 2016	12
Tabel B	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Menurut Jenis Penerimaan Tahun Anggaran 2014 – 2016	13
Tabel C	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Menurut Jenis Penerimaan Tahun Anggaran 2014 – 2016	14
Tabel D	Realisasi Penerimaan Bagian Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Menurut Jenis Penerimaan Tahun Anggaran 2014 – 2016	15
Tabel E	Realisasi Pengeluaran/Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Menurut Jenis Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 – 2016.....	16

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel		Hal
1.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2016 (000 Rp)	17
1.2	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2016 (000 Rp)	18
1.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2016 (000 Rp).....	19
1.4	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2016 (000 Rp).....	20
1.5	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2016 (000 Rp)	21
1.6	Realisasi Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2016 (000 Rp)	22
1.7	Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang sah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2016 (000 Rp).....	23
1.8	Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2016 (000 Rp)	24
1.9	Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2016 (000 Rp)	25
1.10	Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Kab/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2016 (000 Rp)	26
1.11	Realisasi Penerimaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Kab/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2016 (000 Rp)	27
1.12	Realisasi Dana alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2016 (000 Rp).....	28
1.13	Realisasi Penerimaan Lain-Lain yang Sah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2016 (000 Rp)	29
1.14	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2016 (000 Rp)	30

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel		Hal
2.1	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2016 (000 Rp)	31
2.2	Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2016 (000 Rp)	32
2.3	Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2016 (000 Rp)	33
2.4	Realisasi Belanja Bunga Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2016 (000 Rp)	34
2.5	Realisasi Belanja Subsidi Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2016 (000 Rp)	35
2.6	Realisasi Belanja Hibah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2016 (000 Rp)	36
2.7	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2016 (000 Rp)	37
2.8	Realisasi Pengeluaran/Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2016 (000 Rp)	38
2.9	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2016 (000 Rp)	39
2.10	Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2016 (000 Rp).....	40
2.11	Realisasi Belanja Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2016 (000 Rp)	41
2.12	Realisasi Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2016 (000 Rp)	42
2.13	Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Dari Belanja Langsung Kabupaten/ Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2016 (000 Rp)	43
2.14	Realisasi Pengeluaran/Belanja Modal Kabupaten/Kota Se Sulawrsi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2016 (000 Rp)	44
2.15	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2016 (000 Rp)	45

I. PENDAHULUAN

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada era reformasi semakin dituntut serta mendapat porsi yang semakin besar. Hal ini terutama berkaitan dengan program otonomisasi daerah yang telah mulai diterapkan di berbagai daerah Kabupaten/Kota.

Penanganan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus semakin efektif dan efisien. Untuk itu, statistik keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota semakin diperlukan terutama untuk digunakan :

- 1) Sebagai bahan penghitungan PDRB neraca ekonomi baik tingkat daerah maupun PDB pada tingkat nasional, tabel input-output dan neraca arus dana.
- 2) Memberikan gambaran tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 3) Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana masing-masing daerah.
- 4) Sebagai informasi bagi pemerintah pusat untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah.

II. SUMBER DATA

Data dalam publikasi ini diperoleh melalui Bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan yang terdiri dari :

- 1) Realisasi penerimaan daerah otonomi Kabupaten/Kota menurut sumber penerimaan selama tahun anggaran 2015 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016.
- 2) Realisasi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota dirinci menurut jenis pengeluaran selama tahun anggaran 2015 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016.

III. KONSEP DAN DEFINISI

Daftar isian keungan daerah kabupaten/kota (K-2) digunakan untuk mencatat data statistik keuangan meliputi realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah kabupaten/kota. Dalam daftar isian tersebut terdapat beberapa konsep dan definisi yang terkait dengan struktur laporan keuangan kabupaten/kota. Konsep dan definisi tersebut sudah baku sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006. berikut ini beberapa penjelasan dan definisi dalam daftar isian K2.

PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan daerah dalam strruktur laporan keuangan kabupaten/kota, secara umum terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan dana tersebut bertujuan untuk membiayai berbagai keperluan daerah yang bersangkutan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian golongan c, parkir, dan lain-lain.

Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, biaya KTP dan akte catatan sipil, pelayanan pemakaman, pelayanan parkir tepi jalan umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta dan retribusi pelayanan pendidikan. Retribusi jasa usaha mencakup retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga dan sejenisnya. Retribusi perijinan tertentu meliputi retribusi ijin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi Pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda

retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain-lain.

Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak. Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB), Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh Pasal 21), dan lain-lain.

Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH), provisi sumber daya alam kehutanan, dana reboisasi, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutupi kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Tak Langsung
2. Belanja Langsung

Belanja Tak Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari : belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

Belanja Pegawai

Adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Bunga

Adalah pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Belanja Subsidi

Adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membiayai produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja Hibah

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus.

Belanja Bantuan Sosial

Adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota, desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolannya diarahkan/ditetapkan oleh

pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan Keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan Keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

Belanja Tidak Terduga

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah desa.

Belanja Pegawai

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan

program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan pengadaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan,

penghematan belanja, kewajiban pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

Adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penertiban obligasi daerah yang direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

5. Penerimaan Kembali Pemberi Pinjaman

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, provinsi dan atau pemerintah daerah lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Pembentukan Dana Cadangan

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun.

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

3. Pembayaran Pokok Utang

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka panjang.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

<http://sulsel.bps.go.id>

IV. ULASAN SINGKAT

Langkah dan upaya pemerintah dalam menggalakkan otonomisasi daerah di tingkat Kabupaten/Kota pada hakekatnya adalah untuk mendorong gerak roda pembangunan di daerah yaitu melalui optimalisasi kinerja pemerintah daerah, yang pada akhirnya lebih mendorong pertumbuhan perekonomian daerah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dikurangnya ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat terutama dalam hal pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut lebih berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Tabel A.

Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran
2014-2016

Tahun	Realisasi (Juta Rp)	Perubahan (%)
2014	24,864.779	15,73
2015	29.938.845	20,41
2016 *	33.557.316	12,09

Catatan *) Anggaran Belanja dan Belanja Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan selain sebagai pintu gerbang kawasan Timur Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar terutama pertanian, pertambangan/penggalian dan pariwisata. Dengan letak geografis yang strategis dan dengan potensi alam yang dimiliki, program otonomisasi adalah menjadi suatu peluang untuk percepatan pembangunan daerah.

Untuk membiayai pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan

seoptimal mungkin di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Dalam hubungan ini pengelolaan APBD terus disempurnakan agar dapat menghimpun dana yang cukup untuk membiayai pembangunan.

4.1. PENERIMAAN / PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan daerah diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan belanja daerah baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Peningkatan penerimaan daerah khususnya dari pos pendapatan asli daerah (PAD) merupakan suatu hal yang harus terus diupayakan menuju terwujudnya otonomisasi daerah yang lebih nyata.

Tabel B. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Menurut Jenis Penerimaan T.A. 2014-2016 (000 Rp)

Uraian	2014	2015	2016*
A. Pendapatan Daerah	23,174,970,296	27.639.386.121	32.362.524.648
1. Pendapatan Asli Daerah	2,646,184,317	2.896.811.053	3.695.410.696
2. Dana Perimbangan	16,158,411,426	18.890.289.671	22.956.461.694
3. Lain2 pendapatan yg sah	4,370,374,553	5.852.285.398	5.710.652.258
B. Pembiayaan Daerah	1.689.808.919	2.299.459.458	1.194.791.671
Total Penerimaan Daerah	24.864,779,215	29.938.845.579	33.557.316.319

Catatan *) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Total penerimaan Pemerintah Daerah Se Provinsi Sulawesi Selatan selama tiga tahun anggaran terakhir secara riil terus mengalami peningkatan. Pada tahun anggaran 2016 realisasi penerimaan sebesar 33.557.316.319 ribu rupiah meningkat sebesar

12.09 persen dibanding keadaan tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pada tahun anggaran 2015 diperoleh penerimaan sebesar 29.938.845.579 ribu rupiah atau meningkat sebesar 20.41 persen dibanding total penerimaan pada tahun anggaran 2014.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Besarnya penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menggali potensi yang dimilikinya. Jumlah dan peningkatan penerimaan dari PAD tersebut akan memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembiayaan pembangunan secara lebih mandiri.

Tabel C. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Menurut Jenis Penerimaan T.A. 2014-2016 (000 Rp)

Uraian	2014	2015	2016*
1. Pajak Daerah	1,087,231,635	1.212.805.311	1.650.588.785
2. Retribusi Daerah	624,123,555	595.839.464	725.795.629
3. Laba usaha daerah	112,587,770	145.118.049	159.562.447
4. Lainnya	822,241,357	943.048.229	1.159.463.836
Pendapatan Asli Daerah	2,646,184,317	2.896.811.053	3.695.410.696

Pada tahun anggaran 2016, PAD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan adalah sebesar 3.695.410.696 ribu rupiah, Dari jumlah tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kontributor utama, keduanya pada tahun anggaran 2016 menempatkan pajak daerah mencapai sebesar 1.650.588.785 ribu rupiah (44.67 %) dari total PAD, dan retribusi daerah sebesar 725.795.629 ribu rupiah (19.64 %) dari total PAD.

Bagian dari PAD yang menunjukkan kenaikan yang cukup besar adalah dari penerimaan lainnya yang naik sebesar 22.95 persen yaitu dari 943.048.229 ribu rupiah pada tahun 2015 menjadi 1.159.463.836 ribu rupiah pada tahun 2016.

4.1.2. Bagian Dana Perimbangan

Tabel D. Realisasi Penerimaan Bagian Dana Perimbangan Pemda Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan dirinci Menurut Jenis Penerimaan T.A. 2014-2016 (000 Rp)

Uraian	2014	2015	2016*
1. Bagi Hasil Pajak	588.254.966	504.749.711	681.057.403
2. Bagi Hasil Bukan Pajak	141.938.481	125.634.107	229.242.394
3. Dana Alokasi Umum	13.972.903.719	14.644.357.005	15.947.424.502
4. Dana Alokasi Khusus	1.455.314.260	3.615.548.848	6.098.737.395
Jumlah	16.158.411.426	18.890.289.671	22.956.461.694

Penerimaan terbesar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan berasal dari penerimaan dari Dana Perimbangan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi, pada tahun anggaran 2015 sebesar 18.890.289.671 ribu rupiah menjadi 22.956.461.694 ribu rupiah pada tahun anggaran 2016 atau meningkat sebesar 21.53 persen. Kontribusinya terhadap total penerimaan, pada tahun anggaran 2015 sebesar 63.1 persen dan pada tahun anggaran 2016 sebesar 68.41 persen.

Dari bagian Dana Perimbangan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi yang menunjukkan kenaikan yang sangat besar adalah dari Bagi Hasil Bukan Pajak yaitu sebesar 82.46 persen yaitu dari 125.634.107 ribu rupiah pada tahun 2015 menjadi 229.242.394 ribu rupiah pada tahun 2016.

4.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Dibandingkan dengan keadaan pada tahun anggaran 2015, maka tahun anggaran 2016 kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap total penerimaan mengalami penurunan sebesar 2.42 % yaitu dari 5.852.285.398 ribu rupiah pada tahun 2015 menjadi 5.710.652.258 ribu rupiah pada tahun 2016.

4.2 . PENGELUARAN DAERAH

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 Pengeluaran daerah terdiri dari 2 jenis yaitu pengeluaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, sedang format lama terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin diantaranya adalah belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan. Sedangkan pengeluaran pembangunan diantaranya adalah pengeluaran untuk sektor industri, transportasi, tenaga kerja, dsb.

Tabel E. Realisasi Pengeluaran/Belanja Pemerintah Daerah kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan TA 2014-2016 (000 Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016*
1. Belanja Tidak Langsung	11.892.119.407	14.136.908.713	17.072.779.647
2. Belanja Langsung	10.584.611.566	13.055.464.250	16.346.083.270
3. Pembiayaan Daerah	2.388.048.242	2.746.472.615	138.453.402
<i>Jumlah</i>	24.864.779.215	29.938.845.579	33.557.316.320

Pada tahun anggaran 2016, total pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 33.557.316.320 ribu rupiah, dimana 17.072.779.647 ribu rupiah (50.88 persen) diantaranya adalah merupakan pengeluaran/belanja Tidak Langsung Daerah 16.346.083.270 ribu rupiah (48.71 persen) adalah pengeluaran/belanja langsung Pemda TK II se Sulawesi Selatan dan 138.453.402 ribu rupiah (0.0041 persen) adalah Pembiayaan Daerah.

Tabel 01. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	717.495.469	814.744.220	954.465.528
02. Bulukumba	1.156.716.618	1.481.083.680	1.463.552.754
03. Bantaeng	631.217.547	811.243.611	988.227.389
04. Jeneponto	823.240.111	1.071.721.712	1.347.295.132
05. Takalar	936.386.154	1.249.049.426	1.204.936.347
06. Gowa	1.455.991.314	1.599.628.498	1.647.403.763
07. Sinjai	843.919.018	1.073.537.404	1.152.048.451
08. Maros	1.002.593.154	1.153.451.854	1.381.277.402
09. Pangkep	1.119.865.731	1.299.718.872	1.386.579.552
10. Barru	780.218.669	919.249.334	1.017.891.622
11. Bone	1.629.142.952	2.006.908.473	2.171.255.214
12. Soppeng	912.814.998	1.091.701.844	1.169.874.886
13. Wajo	1.255.067.683	1.461.483.923	1.514.675.784
14. Sidrap	822.005.896	1.076.725.954	1.377.172.570
15. Pinrang	1.062.579.802	1.236.264.445	1.338.980.728
16. Enrekang	758.072.895	992.246.447	1.161.082.805
17. Luwu	994.025.579	951.660.316	1.526.226.917
18. Tator	829.482.655	1.305.531.502	1.101.434.362
19. Luwu Timur	1.180.547.937	1.331.355.965	1.560.893.076
20. Luwu Utara	906.984.528	1.107.335.161	1.197.962.023
21. Toraja Utara	726.465.743	833.068.465	941.254.411
22. Makassar	2.870.063.431	3.210.789.724	3.829.221.632
23. Pare-Pare	734.823.286	951.217.711	1.058.246.462
24. Palopo	715.058.045	909.127.038	1.065.357.509
JUMLAH	24.864.779.215	29.938.845.579	33.557.316.319

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.2. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	670.219.100	751.753.804	898.009.424
02. Bulukumba	1.078.540.057	1.332.345.752	1.401.656.665
03. Bantaeng	624.129.081	802.829.889	982.701.700
04. Jeneponto	804.412.065	1.044.672.896	1.262.032.636
05. Takalar	863.221.657	1.014.916.628	1.180.936.347
06. Gowa	1.240.560.247	1.451.309.014	1.622.476.533
07. Sinjai	782.995.288	985.110.700	1.100.922.963
08. Maros	996.256.583	1.133.946.916	1.362.077.402
09. Pangkep	1.025.589.182	1.241.169.937	1.359.454.373
10. Barru	694.098.054	919.249.334	1.013.803.098
11. Bone	1.534.647.762	1.870.233.204	2.132.118.402
12. Soppeng	846.234.823	1.029.061.019	1.169.745.017
13. Wajo	1.103.893.523	1.279.309.666	1.481.360.599
14. Sidrap	820.880.885	1.064.876.799	1.327.370.722
15. Pinrang	996.369.785	1.124.871.559	1.278.032.150
16. Enrekang	734.573.695	919.862.387	1.116.233.981
17. Luwu	939.145.074	847.750.111	1.433.183.521
18. Tator	757.374.394	1.233.181.995	1.101.434.362
19. Luwu Timur	1.003.602.954	1.106.423.416	1.336.075.025
20. Luwu Utara	891.587.139	1.050.920.708	1.186.913.814
21. Toraja Utara	720.114.937	792.081.953	931.754.411
22. Makassar	2.629.857.748	2.952.609.911	3.659.221.632
23. Pare-Pare	712.407.753	836.568.077	1.020.246.462
24. Palopo	704.258.510	854.330.446	1.004.763.409
JUMLAH	23.174.970.296	27.639.386.121	32.362.524.648

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	35.602.099	40.231.013	46.477.787
02. Bulukumba	89.616.626	106.037.895	130.349.986
03. Bantaeng	43.384.988	43.800.070	62.492.245
04. Jeneponto	46.032.160	61.267.880	77.550.900
05. Takalar	76.850.715	74.855.245	105.115.845
06. Gowa	149.352.696	154.772.384	159.979.474
07. Sinjai	46.404.260	75.599.713	57.697.813
08. Maros	118.267.910	141.487.686	180.007.000
09. Pangkep	129.209.744	143.977.667	154.595.538
10. Barru	45.076.357	56.315.635	64.690.537
11. Bone	155.427.196	159.866.219	155.636.250
12. Soppeng	60.544.221	68.403.420	59.817.709
13. Wajo	99.680.372	114.351.421	111.894.036
14. Sidrap	64.628.524	76.076.376	126.564.150
15. Pinrang	93.521.199	37.535.416	93.793.056
16. Enrekang	32.455.808	49.214.800	91.793.908
17. Luwu	64.132.445	103.495.566	59.255.421
18. Tator	82.506.083	78.563.672	76.974.890
19. Luwu Timur	134.350.836	155.962.925	166.867.312
20. Luwu Utara	128.639.246	84.668.434	79.658.721
21. Toraja Utara	25.284.959	33.808.407	41.384.041
22. Makassar	731.170.425	828.871.893	1.305.180.008
23. Pare-Pare	112.395.774	115.369.532	137.515.118
24. Palopo	81.649.674	92.277.784	150.118.951
JUMLAH	2.646.184.317	2.896.811.053	3.695.410.696

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.4. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	4.184.917	6.087.786	4.952.000
02. Bulukumba	20.141.318	22.670.379	28.028.080
03. Bantaeng	7.933.483	7.405.931	12.804.476
04. Jeneponto	8.728.179	8.959.130	9.046.150
05. Takalar	14.956.015	9.470.497	16.108.558
06. Gowa	63.143.326	72.080.464	65.675.635
07. Sinjai	9.318.073	10.812.470	9.669.594
08. Maros	57.503.300	64.898.606	71.301.000
09. Pangkep	71.703.862	72.530.832	72.835.110
10. Barru	8.700.952	10.425.114	8.670.000
11. Bone	36.277.176	35.125.638	35.083.033
12. Soppeng	10.417.526	11.219.938	10.196.100
13. Wajo	22.330.806	24.696.358	23.444.652
14. Sidrap	16.679.704	21.125.803	28.858.369
15. Pinrang	16.790.726	19.274.384	16.277.728
16. Enrekang	6.071.709	7.340.370	8.134.000
17. Luwu	13.488.085	8.174.064	13.310.000
18. Tator	6.516.318	15.996.577	6.410.150
19. Luwu Timur	75.114.216	87.031.484	86.767.235
20. Luwu Utara	10.401.578	11.353.555	10.757.581
21. Toraja Utara	8.718.950	10.300.490	11.729.685
22. Makassar	561.697.248	635.647.207	1.063.441.478
23. Pare-Pare	19.907.390	21.408.208	19.337.500
24. Palopo	16.506.778	18.770.026	17.750.672
JUMLAH	1.087.231.635	1.212.805.311	1.650.588.785

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.5. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	7.376.166	8.750.481	13.144.500
02. Bulukumba	10.591.173	9.408.384	16.634.114
03. Bantaeng	25.559.191	22.298.435	7.336.904
04. Jeneponto	26.651.809	39.545.465	43.933.115
05. Takalar	39.111.323	6.156.179	14.225.664
06. Gowa	53.159.809	45.700.441	66.895.466
07. Sinjai	7.124.641	8.046.757	6.422.526
08. Maros	39.363.461	50.622.503	61.206.000
09. Pangkep	36.256.449	51.457.139	61.371.320
10. Barru	15.922.304	4.920.779	11.729.027
11. Bone	15.378.571	15.221.326	14.343.222
12. Soppeng	9.553.788	6.337.437	6.443.109
13. Wajo	19.798.856	16.607.051	18.755.193
14. Sidrap	33.184.946	34.549.479	68.297.858
15. Pinrang	4.933.487	6.601.517	3.474.336
16. Enrekang	13.266.264	15.557.658	30.267.700
17. Luwu	28.787.203	75.215.015	26.660.300
18. Tator	59.960.987	28.804.592	5.754.445
19. Luwu Timur	8.245.313	8.059.463	9.502.650
20. Luwu Utara	9.538.488	6.425.483	5.171.215
21. Toraja Utara	7.871.202	6.663.345	10.187.119
22. Makassar	135.918.535	115.220.022	145.971.670
23. Pare-Pare	10.280.547	7.641.156	11.336.839
24. Palopo	6.289.042	6.029.358	66.731.337
JUMLAH	624.123.555	595.839.464	725.795.629

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.6. Realisasi Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	7.587.079	9.762.029	9.700.000
02. Bulukumba	1.099.424	2.017.150	2.100.000
03. Bantaeng	4.378.741	5.090.901	5.808.297
04. Jeneponto	4.208.140	4.898.792	5.034.000
05. Takalar	6.149.982	7.325.647	7.325.650
06. Gowa	2.444.802	2.507.985	3.425.000
07. Sinjai	3.108.716	4.442.532	4.442.532
08. Maros	3.677.384	6.267.572	9.000.000
09. Pangkep	8.740.986	10.071.480	10.000.000
10. Barru	5.440.253	7.132.065	7.132.065
11. Bone	2.331.537	2.953.683	2.886.469
12. Soppeng	6.331.166	8.452.817	8.452.817
13. Wajo	6.141.610	7.684.379	8.684.379
14. Sidrap	3.885.895	4.538.587	5.738.586
15. Pinrang	6.558.633	7.924.516	7.924.516
16. Enrekang	2.912.294	3.387.902	5.050.000
17. Luwu	3.563.650	2.758.233	4.370.491
18. Tator	2.198.848	4.370.491	3.530.063
19. Luwu Timur	11.316.486	17.626.045	21.200.000
20. Luwu Utara	1.118.380	1.320.753	1.320.753
21. Toraja Utara	1.876.603	2.689.533	2.995.000
22. Makassar	11.635.644	13.389.022	14.415.420
23. Pare-Pare	3.127.672	4.274.436	4.500.000
24. Palopo	2.753.845	4.231.499	4.526.409
JUMLAH	112.587.770	145.118.049	159.562.447

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.7. Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten/Kota
Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	16.453.937	15.630.717	18.681.287
02. Bulukumba	57.784.711	71.941.983	83.587.792
03. Bantaeng	5.513.573	9.004.803	36.542.569
04. Jeneponto	6.444.032	7.864.493	19.537.635
05. Takalar	16.633.395	51.902.922	67.455.973
06. Gowa	30.604.759	34.483.493	23.983.373
07. Sinjai	26.852.830	52.297.954	37.163.161
08. Maros	17.723.765	19.699.005	38.500.000
09. Pangkep	12.508.447	9.918.216	10.389.108
10. Barru	15.012.848	33.837.677	37.159.445
11. Bone	101.439.912	106.565.572	103.323.526
12. Soppeng	34.241.741	42.393.228	34.725.683
13. Wajo	51.409.100	65.363.633	61.009.812
14. Sidrap	10.877.979	15.862.507	23.669.337
15. Pinrang	65.238.353	3.734.999	66.116.476
16. Enrekang	10.205.541	22.928.870	48.342.208
17. Luwu	18.293.507	17.348.254	14.914.630
18. Tator	13.829.930	29.392.012	61.280.232
19. Luwu Timur	39.674.821	43.245.933	49.397.427
20. Luwu Utara	107.580.800	65.568.644	62.409.172
21. Toraja Utara	6.818.204	14.155.039	16.472.237
22. Makassar	21.918.998	64.615.642	81.351.440
23. Pare-Pare	79.080.165	82.045.733	102.340.779
24. Palopo	56.100.009	63.246.901	61.110.534
JUMLAH	822.241.357	943.048.229	1.159.463.836

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.8. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota
Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	547.019.013	603.533.542	774.284.000
02. Bulukumba	751.301.934	893.750.209	933.029.148
03. Bantaeng	493.410.937	622.234.570	813.973.521
04. Jeneponto	637.516.658	788.961.673	910.835.563
05. Takalar	643.331.689	745.292.481	824.626.783
06. Gowa	846.321.528	953.787.108	1.293.053.878
07. Sinjai	595.871.037	721.962.707	964.172.045
08. Maros	713.906.816	759.792.905	914.891.847
09. Pangkep	724.605.579	865.570.542	1.094.275.812
10. Barru	540.104.377	680.800.537	765.706.623
11. Bone	1.083.624.984	1.242.614.367	1.385.906.150
12. Soppeng	635.227.489	741.164.343	999.032.153
13. Wajo	788.802.818	907.697.558	1.078.839.765
14. Sidrap	609.321.208	772.746.113	880.346.420
15. Pinrang	704.993.385	851.198.075	947.590.426
16. Enrekang	550.815.324	716.849.788	882.495.361
17. Luwu	682.313.624	608.338.372	1.101.104.362
18. Tator	566.516.703	839.139.299	918.611.463
19. Luwu Timur	598.656.375	627.288.470	804.913.799
20. Luwu Utara	650.885.088	709.245.009	948.693.123
21. Toraja Utara	558.111.629	621.128.846	689.380.509
22. Makassar	1.251.876.573	1.402.767.592	1.617.274.941
23. Pare-Pare	480.140.326	588.312.793	676.243.253
24. Palopo	503.736.332	626.112.771	737.180.749
JUMLAH	16.158.411.426	18.890.289.671	22.956.461.694

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.9. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	15.361.544	13.590.338	13.716.174
02. Bulukumba	18.542.252	17.048.258	21.197.212
03. Bantaeng	18.691.569	13.189.984	13.886.996
04. Jeneponto	20.224.848	14.523.760	20.224.848
05. Takalar	5.043.060	7.788.205	18.349.965
06. Gowa	17.644.435	17.917.485	22.785.919
07. Sinjai	15.675.957	14.273.865	18.026.937
08. Maros	17.934.034	17.341.562	22.774.498
09. Pangkep	25.534.886	24.184.249	26.540.331
10. Barru	14.989.989	13.212.737	13.334.655
11. Bone	42.246.866	30.917.818	34.064.482
12. Soppeng	19.518.344	18.572.192	24.446.667
13. Wajo	68.384.741	56.121.027	70.694.855
14. Sidrap	20.579.510	17.992.462	35.508.164
15. Pinrang	16.581.731	16.714.623	18.003.856
16. Enrekang	16.743.037	15.662.423	15.897.714
17. Luwu	14.447.858	22.469.393	13.841.132
18. Tator	17.912.474	12.650.419	19.069.801
19. Luwu Timur	52.412.593	43.783.788	55.395.240
20. Luwu Utara	20.625.322	17.355.166	24.709.244
21. Toraja Utara	10.814.207	9.949.696	16.096.842
22. Makassar	85.568.125	65.213.907	115.107.977
23. Pare-Pare	18.169.596	13.272.005	31.982.592
24. Palopo	14.607.988	11.004.349	15.401.302
JUMLAH	588.254.966	504.749.711	681.057.403

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.10. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	3.829.426	3.756.144	9.794.590
02. Bulukumba	3.417.136	2.235.870	2.302.788
03. Bantaeng	2.860.547	1.840.245	8.545.289
04. Jeneponto	3.117.887	2.174.321	3.117.887
05. Takalar	8.960.546	7.546.005	1.956.368
06. Gowa	1.749.471	1.840.245	1.276.282
07. Sinjai	3.251.690	2.700.169	3.766.589
08. Maros	2.947.670	1.840.245	2.812.473
09. Pangkep	3.104.213	2.201.079	8.980.627
10. Barru	3.223.953	2.094.380	8.600.999
11. Bone	4.660.474	3.979.494	3.649.926
12. Soppeng	2.862.849	1.919.237	1.671.978
13. Wajo	25.819.187	4.426.705	34.968.318
14. Sidrap	3.330.538	2.234.894	11.768.758
15. Pinrang	3.079.564	0	600.555
16. Enrekang	3.053.317	2.505.549	8.932.066
17. Luwu	4.156.296	4.025.149	5.249.819
18. Tator	3.208.826	4.233.668	2.756.692
19. Luwu Timur	27.829.438	30.239.833	83.187.718
20. Luwu Utara	5.280.554	5.906.587	8.791.923
21. Toraja Utara	12.850.014	31.870.769	3.999.058
22. Makassar	2.860.546	1.840.245	8.545.289
23. Pare-Pare	3.079.425	1.840.245	1.391.332
24. Palopo	3.404.914	2.383.028	2.575.071
JUMLAH	141.938.481	125.634.107	229.242.394

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.11. Realisasi Penerimaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	458,019,013	479.393.610	535.836.163
02. Bulukumba	75,444,820	712.895.671	716.654.228
03. Bantaeng	47,287,960	444.919.431	497.448.542
04. Jeneponto	72,023,040	571.867.452	622.189.918
05. Takalar	565,195,363	554.136.141	597.985.640
06. Gowa	80,227,530	795.078.108	850.677.296
07. Sinjai	55,315,050	541.097.983	596.296.644
08. Maros	78,426,630	645.209.768	704.125.166
09. Pangkep	623,418,990	650.132.194	701.629.223
10. Barru	471,135,015	488.014.810	519.152.475
11. Bone	950,401,934	977.807.065	1.088.618.062
12. Soppeng	569,126,996	589.049.244	635.976.768
13. Wajo	631,247,160	652.585.413	722.487.872
14. Sidrap	533,655,220	574.364.767	618.402.978
15. Pinrang	629,285,550	654.520.422	702.399.157
16. Enrekang	480,887,270	526.156.286	543.890.364
17. Luwu	595,699,150	510.857.220	689.096.791
18. Tator	486,447,423	624.131.623	555.007.866
19. Luwu Timur	462,819,314	473.135.918	550.581.811
20. Luwu Utara	573,100,112	601.496.441	658.873.349
21. Toraja Utara	448,417,228	471.481.781	527.790.139
22. Makassar	1,114,853,212	1.198.866.380	1.324.023.135
23. Pare-Pare	426,405,955	430.750.753	462.883.790
24. Palopo	449,242,430	476.408.524	525.397.125
JUMLAH	13,972,903,719	14.644.357.005	15.947.424.502

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.12. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	69,809,030	106.793.450	214.937.073
02. Bulukumba	75,444,820	161.570.410	192.874.920
03. Bantaeng	47,287,960	162.284.910	294.092.694
04. Jeneponto	72,023,040	200.396.140	265.302.910
05. Takalar	64,132,720	175.822.130	206.334.810
06. Gowa	80,227,530	138.951.270	418.314.381
07. Sinjai	55,315,050	163.890.690	346.081.875
08. Maros	78,426,630	95.401.330	185.179.710
09. Pangkep	72,547,490	189.053.020	357.125.631
10. Barru	50,755,420	177.478.610	224.618.494
11. Bone	86,315,710	229.909.990	259.573.680
12. Soppeng	43,719,300	131.623.670	336.936.740
13. Wajo	63,351,730	194.564.413	250.688.720
14. Sidrap	51,755,940	178.153.990	214.666.520
15. Pinrang	56,046,540	179.963.030	226.586.858
16. Enrekang	50,131,700	172.525.530	313.775.217
17. Luwu	68,010,320	70.986.610	392.916.620
18. Tator	58,947,980	198.123.590	341.777.104
19. Luwu Timur	55,595,030	80.128.930	115.749.030
20. Luwu Utara	51,879,100	84.486.815	256.318.607
21. Toraja Utara	86,030,180	107.826.600	141.494.470
22. Makassar	48,594,690	136.847.060	169.598.540
23. Pare-Pare	32,485,350	142.449.790	179.985.540
24. Palopo	36,481,000	136.316.870	193.807.251
JUMLAH	1,455,314,260	3.615.548.848	6.098.737.395

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.13. Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	87,597,988	107.989.249	77.247.637
02. Bulukumba	237,621,497	332.557.648	338.277.531
03. Bantaeng	87,333,156	136.795.249	106.235.934
04. Jeneponto	120,863,247	194.443.343	273.646.173
05. Takalar	143,039,253	194.768.903	251.193.719
06. Gowa	244,886,023	342.749.521	169.443.181
07. Sinjai	140,719,991	187.548.280	79.053.105
08. Maros	164,081,857	232.666.325	267.178.555
09. Pangkep	171,773,859	231.621.728	110.583.023
10. Barru	108,917,320	182.133.162	183.405.938
11. Bone	295,595,582	467.752.618	590.576.002
12. Soppeng	150,463,113	219.493.256	110.895.155
13. Wajo	215,410,333	257.260.687	290.626.798
14. Sidrap	146,931,153	216.054.310	320.460.152
15. Pinrang	197,855,201	236.138.068	236.648.668
16. Enrekang	151,302,563	153.797.799	141.944.712
17. Luwu	192,699,005	135.916.173	272.823.738
18. Tator	108,351,608	315.479.023	105.848.009
19. Luwu Timur	270,595,743	323.172.022	364.293.914
20. Luwu Utara	112,062,805	257.007.265	158.561.970
21. Toraja Utara	136,718,349	137.144.700	200.989.861
22. Makassar	646,810,750	720.970.425	736.766.683
23. Pare-Pare	119,871,653	132.885.752	206.488.091
24. Palopo	118,872,504	135.939.890	117.463.709
JUMLAH	4,370,374,553	5.852.285.398	5.710.652.258

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.14. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	47,276,369	62.990.416	56.456.104
02. Bulukumba	78,176,561	148.737.928	61.896.089
03. Bantaeng	7,088,466	8.413.722	5.525.689
04. Jeneponto	18,828,046	27.048.816	85.262.496
05. Takalar	73,164,497	234.132.798	24.000.000
06. Gowa	215,431,067	148.319.484	24.927.230
07. Sinjai	60,923,730	88.426.704	51.125.488
08. Maros	6,336,571	19.504.938	19.200.000
09. Pangkep	94,276,549	58.548.935	27.125.179
10. Barru	86,120,615	0	4.088.524
11. Bone	94,495,190	136.675.269	39.136.812
12. Soppeng	66,580,175	62.640.825	129.869
13. Wajo	151,174,160	182.174.257	33.315.185
14. Sidrap	1,125,011	11.849.155	49.801.848
15. Pinrang	66,210,017	111.392.886	60.948.578
16. Enrekang	23,499,200	72.384.060	44.848.824
17. Luwu	54,880,505	103.910.205	93.043.396
18. Tator	72,108,261	72.349.507	0
19. Luwu Timur	176,944,983	224.932.549	224.818.051
20. Luwu Utara	15,397,389	56.414.453	11.048.209
21. Toraja Utara	6,350,806	40.986.512	9.500.000
22. Makassar	240,205,683	258.179.813	170.000.000
23. Pare-Pare	22,415,533	114.649.634	38.000.000
24. Palopo	10,799,535	54.796.592	60.594.100
JUMLAH	1,689,808,919	2.299.459.458	1.194.791.671

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 2.1. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	717,495,469	750.964.957	953.965.528
02. Bulukumba	1,156,716,618	1.370.710.593	1.435.552.152
03. Bantaeng	631,217,547	775.391.882	987.882.739
04. Jeneponto	823,240,111	1.016.009.204	1.347.295.132
05. Takalar	936,386,154	964.267.243	1.201.936.348
06. Gowa	1,455,991,314	1.472.120.934	1.643.415.334
07. Sinjai	843,919,018	926.688.086	1.151.248.451
08. Maros	1,002,593,154	1.119.660.085	1.359.777.302
09. Pangkep	1,119,865,731	1.230.757.123	1.385.879.552
10. Barru	780,218,669	742.057.915	1.009.754.900
11. Bone	1,629,142,952	1.841.775.311	2.162.904.141
12. Soppeng	912,814,998	997.459.449	1.164.874.881
13. Wajo	1,255,067,683	1.251.469.837	1.509.491.283
14. Sidrap	822,005,896	1.044.498.206	1.373.420.570
15. Pinrang	1,062,579,802	1.124.871.559	1.338.980.728
16. Enrekang	758,072,895	903.111.742	1.149.853.332
17. Luwu	994,025,579	834.383.111	1.518.521.618
18. Tator	829,482,655	1.145.226.165	1.099.934.362
19. Luwu Timur	1,180,547,937	1.185.957.953	1.556.893.077
20. Luwu Utara	906,984,528	1.078.436.397	1.197.962.023
21. Toraja Utara	726,465,743	808.925.637	938.254.411
22. Makassar	2,870,063,431	3.062.274.394	3.825.221.632
23. Pare-Pare	734,823,286	783.381.099	1.052.521.387
24. Palopo	715,058,045	761.974.081	1.053.322.034
JUMLAH	24,864,779,215	27.192.372.962	33.418.862.917

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 2.2. Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	303,162,585	368.363.237	473.412.334
02. Bulukumba	581,004,674	702.466.449	777.767.554
03. Bantaeng	304,226,805	395.821.421	451.082.269
04. Jeneponto	425,005,781	495.511.385	677.138.877
05. Takalar	439,864,916	500.473.339	679.087.287
06. Gowa	694,852,204	866.206.201	1.017.743.175
07. Sinjai	415,282,304	488.178.847	616.952.425
08. Maros	471,203,785	583.762.706	720.208.790
09. Pangkep	572,686,041	629.596.634	689.826.959
10. Barru	393,375,374	465.593.222	597.940.808
11. Bone	954,988,554	1.192.434.833	1.466.820.727
12. Soppeng	516,767,099	597.077.818	674.374.691
13. Wajo	543,171,787	632.201.715	811.245.349
14. Sidrap	464,176,423	513.151.817	608.290.871
15. Pinrang	532,710,521	671.803.444	747.148.932
16. Enrekang	383,077,668	450.227.878	552.360.790
17. Luwu	492,272,860	461.156.193	778.188.638
18. Tator	405,910,691	602.813.084	585.379.859
19. Luwu Timur	376,223,437	513.244.411	604.670.098
20. Luwu Utara	425,901,715	595.265.240	654.686.080
21. Toraja Utara	349,743,068	439.386.129	541.753.585
22. Makassar	1,165,467,158	1.227.218.576	1.509.683.787
23. Pare-Pare	321,614,156	359.528.158	398.637.565
24. Palopo	359,429,801	385.425.976	438.378.198
JUMLAH	11,892,119,407	14.136.908.713	17.072.779.647

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 2.3. Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	260,394,469	285.340.856	357.145.954
02. Bulukumba	541,206,391	570.926.948	658.877.251
03. Bantaeng	282,015,706	319.703.159	383.553.655
04. Jeneponto	405,748,421	436.221.311	575.285.089
05. Takalar	423,730,773	465.097.067	593.885.675
06. Gowa	648,253,192	710.491.187	840.352.000
07. Sinjai	398,754,476	441.779.744	495.607.691
08. Maros	443,971,196	513.917.540	583.572.123
09. Pangkep	501,169,201	535.233.244	619.841.841
10. Barru	346,900,553	382.239.329	504.534.339
11. Bone	844,399,547	894.670.854	1.086.702.208
12. Soppeng	460,276,751	500.029.932	568.296.570
13. Wajo	502,694,682	556.557.922	673.534.096
14. Sidrap	437,988,120	476.527.635	539.485.866
15. Pinrang	487,520,185	604.657.926	670.031.182
16. Enrekang	355,666,711	399.236.966	451.551.388
17. Luwu	429,858,130	428.251.337	567.017.139
18. Tator	376,947,765	471.593.014	446.472.231
19. Luwu Timur	295,140,419	358.507.406	435.943.038
20. Luwu Utara	384,580,259	423.029.027	469.503.265
21. Toraja Utara	312,358,422	334.710.609	407.013.121
22. Makassar	1,141,996,475	1.193.551.733	1.477.561.044
23. Pare-Pare	313,219,875	345.661.956	377.750.368
24. Palopo	346,068,474	378.136.248	427.379.891
JUMLAH	10,940,860,193	12.026.072.951	14.210.897.026

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 2.4. Realisasi Belanja Bunga Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	0	0	0
02. Bulukumba	1,252,523	906.956	3.000.000
03. Bantaeng	76,944	30.541.223	56.414
04. Jeneponto	0	0	0
05. Takalar	114,643	0	0
06. Gowa	0	0	0
07. Sinjai	0	0	0
08. Maros	0	0	0
09. Pangkep	16,778	9.328	30.000
10. Barru	3,720,581	3.387.447	5.191.298
11. Bone	1,601,042	1.265.190	3.310.970
12. Soppeng	0	0	0
13. Wajo	82,640	60.400	70.000
14. Sidrap	2,207,840	2.019.927	2.654.000
15. Pinrang	47,851	0	0
16. Enrekang	0	0	0
17. Luwu	0	94.487	0
18. Tator	83,168	0	115.000.000
19. Luwu Timur	0	0	0
20. Luwu Utara	0	0	0
21. Toraja Utara	0	0	0
22. Makassar	1,967,227	1.554.072	1.250.000
23. Pare-Pare	3,393,912	3.120.199	4.500.000
24. Palopo	7,521,309	3.154.633	3.357.876
JUMLAH	22,086,458	46.113.862	138.420.558

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 2.5. Realisasi Belanja Subsidi Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	0	0	0
02. Bulukumba	0	0	0
03. Bantaeng	0	0	0
04. Jeneponto	0	0	0
05. Takalar	0	0	0
06. Gowa	0	25.912.827	5.000.000
07. Sinjai	0	0	0
08. Maros	0	0	0
09. Pangkep	0	0	0
10. Barru	0	0	0
11. Bone	31,909,348	28.630.891	45.761.192
12. Soppeng	0	0	0
13. Wajo	0	0	0
14. Sidrap	0	0	0
15. Pinrang	401,859	0	0
16. Enrekang	0	0	0
17. Luwu	0	0	0
18. Tator	0	0	0
19. Luwu Timur	0	0	0
20. Luwu Utara	35,000	40.000	50.000
21. Toraja Utara	0	0	0
22. Makassar	0	0	0
23. Pare-Pare	0	0	2.919.420
24. Palopo	0	0	0
JUMLAH	32,346,207	54.583.718	53.730.612

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 2.6. Realisasi Belanja Hibah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	760,000	18.374.450	5.500.000
02. Bulukumba	3,758,919	69.981.804	3.413.500
03. Bantaeng	3,650,000	4.565.000	5.405.000
04. Jeneponto	3,535,385	4.640.948	3.000.000
05. Takalar	1,670,000	2.750.000	11.600.000
06. Gowa	21,919,419	25.912.827	5.000.000
07. Sinjai	4,757,830	6.624.220	12.901.914
08. Maros	4,389,492	25.299.977	7.600.000
09. Pangkep	51,756,690	55.024.049	5.865.130
10. Barru	12,215,005	35.717.420	2.565.000
11. Bone	6,482,500	2.157.500	9.220.000
12. Soppeng	39,366,498	60.970.491	1.320.000
13. Wajo	9,265,944	6.353.500	3.588.071
14. Sidrap	3,923,434	0	2.400.000
15. Pinrang	22,217,851	19.049.321	4.845.000
16. Enrekang	5,864,648	2.773.000	3.288.000
17. Luwu	24,988,163	9.352.959	4.366.500
18. Tator	8,232,495	4.299.500	4.227.000
19. Luwu Timur	2,438,794	32.169.841	1.740.000
20. Luwu Utara	7,585,309	59.560.290	7.893.000
21. Toraja Utara	12,957,217	23.406.146	8.160.306
22. Makassar	20,017,466	21.405.756	20.775.000
23. Pare-Pare	4,104,500	3.241.000	8.550.000
24. Palopo	4,844,630	3.389.150	3.800.000
JUMLAH	280,702,189	497.019.149	147.023.421

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 2.7. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	0	7.500	175.000
02. Bulukumba	1,217,390	767.199	488.500
03. Bantaeng	1,808,750	869.000	0
04. Jeneponto	1,484,787	100.000	300.000
05. Takalar	4,175,750	1.000.000	1.000.000
06. Gowa	3,254,987	10.708.183	2.046.050
07. Sinjai	2000	0	31.000
08. Maros	1,875,000	450.000	500.000
09. Pangkep	3,240,023	2.219.100	1.949.500
10. Barru	363,726	454.473	22.444
11. Bone	3,349,500	50.960.276	780.000
12. Soppeng	1,251,915	0	0
13. Wajo	15,500	4.500	25.000
14. Sidrap	836,660	0	0
15. Pinrang	292,700	1.350.000	2.050.000
16. Enrekang	3,617,000	89.000	1.300.000
17. Luwu	4,952,757	3.774.483	3.379.000
18. Tator	3,322,308	411.000	2.704.000
19. Luwu Timur	6,630,915	88.200	9.710.000
20. Luwu Utara	15,000	110.624.705	0
21. Toraja Utara	0	0	0
22. Makassar	672,500	0	0
23. Pare-Pare	7,000	6.515.699	2.000.000
24. Palopo	448,675	96.400	1.500.000
JUMLAH	42,834,843	190.489.717	29.960.494

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 2.8. Realisasi Pengeluaran/Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	182,607	1.076.100	1.809.702
02. Bulukumba	2,644,094	2.259.233	4.466.219
03. Bantaeng	1,079,364	1.073.406	2.016.356
04. Jeneponto	0	0	1.820.045
05. Takalar	385,128	0	0
06. Gowa	2,320,868	1.675.444	1.675.444
07. Sinjai	358,383	0	1.609.212
08. Maros	0	0	0
09. Pangkep	16,237,849	0	0
10. Barru	30,175,509	0	0
11. Bone	66,375,911	0	0
12. Soppeng	0	0	1.603.221
13. Wajo	0	0	0
14. Sidrap	15,216,192	0	2.528.319
15. Pinrang	369,081	0	0
16. Enrekang	0	0	0
17. Luwu	32,223,810	14.149.141	4.002.030
18. Tator	12,454,105	3.788.949	1.007.500
19. Luwu Timur	7,538,004	8.334.499	8.335.953
20. Luwu Utara	1,219,713	1.440.467	1.381.770
21. Toraja Utara	1,948,910	2.038.637	2.731.236
22. Makassar	0	0	0
23. Pare-Pare	0	0	0
24. Palopo	0	0	0
JUMLAH	190,729,528	35.835.877	34.987.007

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 2.9. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	41,445,688	63.540.662	107.781.678
02. Bulukumba	30,188,995	57.624.310	107.022.084
03. Bantaeng	14,441,025	38.786.408	58.630.844
04. Jeneponto	14,237,188	53.849.126	95.733.743
05. Takalar	9,695,622	31.626.272	67.048.233
06. Gowa	19,103,738	117.418.561	168.169.681
07. Sinjai	10,514,695	34.460.015	105.552.608
08. Maros	20,595,447	43.711.689	126.636.667
09. Pangkep	0	36.632.856	61.140.488
10. Barru	0	43.794.553	83.627.727
11. Bone	870,706	214.508.372	320.046.357
12. Soppeng	15,853,446	35.949.221	99.671.620
13. Wajo	30,143,475	67.726.209	130.028.182
14. Sidrap	0	34.259.605	56.222.686
15. Pinrang	21,317,046	44.246.197	67.722.750
16. Enrekang	16,723,812	48.128.912	95.531.402
17. Luwu	250,000	0	199.423.968
18. Tator	0	122.425.535	129.354.128
19. Luwu Timur	64,475,305	114.144.464	147.441.106
20. Luwu Utara	32,152,894	0	174.858.045
21. Toraja Utara	22,478,519	79.230.737	122.848.921
22. Makassar	813,490	1.097.743	5.097.743
23. Pare-Pare	587,084	805.904	917.777
24. Palopo	546,713	649.545	840.431
JUMLAH	366,434,888	1.284.616.896	2.531.348.871

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 2.10. Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	379,821	23.669	1.000.000
02. Bulukumba	736,362	0	500.000
03. Bantaeng	1,155,016	283.225	1.420.000
04. Jeneponto	0	700.000	1.000.000
05. Takalar	93,000	0	5.553.379
06. Gowa	0	0	500.000
07. Sinjai	894,920	5.314.868	1.250.000
08. Maros	372,650	383.500	1.900.000
09. Pangkep	265,500	478.057	1.000.000
10. Barru	0	0	2.000.000
11. Bone	0	241.750	1.000.000
12. Soppeng	18,489	128.174	3.483.280
13. Wajo	969,546	1.499.184	4.000.000
14. Sidrap	4,004,117	344.650	5.000.000
15. Pinrang	543,948	2.500.000	2.500.000
16. Enrekang	1,205,497	0	750.000
17. Luwu	0	5.533.786	0
18. Tator	4,870,850	295.086	1.500.000
19. Luwu Timur	0	0	1.500.000
20. Luwu Utara	313,540	570.750	1.000.000
21. Toraja Utara	0	0	1.000.000
22. Makassar	0	9.609.273	5.000.000
23. Pare-Pare	301,785	183.400	2.000.000
24. Palopo	0	0	1.500.000
JUMLAH	16,125,101	28.089.371	46.356.658

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 2.11. Realisasi Belanja Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	351,403,398	382.601.720	480.553.194
02. Bulukumba	470,523,462	668.244.143	657.784.597
03. Bantaeng	318,404,693	379.570.462	536.800.470
04. Jeneponto	369,218,551	520.497.819	670.156.255
05. Takalar	377,932,220	463.793.904	522.849.061
06. Gowa	580,985,549	605.914.734	625.672.159
07. Sinjai	346,389,136	438.509.239	534.296.026
08. Maros	495,668,798	535.897.379	639.568.512
09. Pangkep	488,567,666	601.160.489	696.052.593
10. Barru	246,211,983	276.464.693	411.814.092
11. Bone	532,011,600	649.340.478	696.083.414
12. Soppeng	324,972,046	400.381.631	490.500.190
13. Wajo	523,802,146	619.268.122	698.245.934
14. Sidrap	348,491,614	531.346.388	765.129.699
15. Pinrang	415,154,530	453.068.115	591.831.796
16. Enrekang	270,780,386	452.883.864	597.492.542
17. Luwu	425,085,965	373.226.918	740.332.980
18. Tator	328,515,151	542.413.082	514.554.503
19. Luwu Timur	568,917,897	672.713.542	952.222.979
20. Luwu Utara	422,917,205	483.171.157	543.275.943
21. Toraja Utara	355,833,697	369.539.508	396.500.827
22. Makassar	1,440,616,175	1.835.055.817	2.315.537.845
23. Pare-Pare	293,173,688	423.852.941	653.883.822
24. Palopo	289,034,010	376.548.104	614.943.836
JUMLAH	10,584,611,566	13.055.464.250	16.346.083.270

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 2.12. Realisasi Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	59,732,329	36.708.170	48.445.765
02. Bulukumba	62,685,637	40.352.525	48.491.115
03. Bantaeng	14,200,357	21.010.108	31.729.668
04. Jeneponto	8,748,910	7.964.760	10.388.192
05. Takalar	41,599,755	62.118.162	58.752.151
06. Gowa	20,143,857	18.248.058	41.911.659
07. Sinjai	17,519,037	32.504.985	31.148.630
08. Maros	16,783,821	13.341.596	20.279.771
09. Pangkep	48,060,106	42.545.639	35.181.548
10. Barru	11,387,663	262.146	13.396.569
11. Bone	19,035,659	18.692.727	22.055.730
12. Soppeng	51,337,397	42.161.006	35.476.395
13. Wajo	30,652,430	44.145.336	59.300.984
14. Sidrap	43,755,516	53.764.985	53.878.963
15. Pinrang	31,815,859	31.605.983	35.193.935
16. Enrekang	26,110,046	18.932.440	25.675.085
17. Luwu	16,378,673	32.904.857	19.401.177
18. Tator	28,962,927	15.556.001	50.632.736
19. Luwu Timur	3,368,955	8.815.797	6.676.189
20. Luwu Utara	27,446,654	26.802.286	22.671.545
21. Toraja Utara	19,256,539	17.757.138	16.532.960
22. Makassar	166,856,168	157.930.377	206.593.677
23. Pare-Pare	13,565,806	15.055.285	16.934.325
24. Palopo	49,006,529	62.690.984	62.191.733
JUMLAH	828,410,630	821.871.350	972.940.501

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 2.13. Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Dari Belanja Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	122,905,607	163.533.948	182.915.086
02. Bulukumba	188,877,116	302.453.740	291.982.503
03. Bantaeng	180,427,969	244.993.838	216.943.850
04. Jeneponto	210,894,789	16.200	311.134.888
05. Takalar	185,411,853	190.151.826	187.713.085
06. Gowa	181,158,379	201.865.514	292.487.013
07. Sinjai	171,381,664	210.881.888	202.433.832
08. Maros	181,062,578	196.862.484	251.116.078
09. Pangkep	134,778,122	153.661.802	250.570.530
10. Barru	114,378,238	127.142.512	169.925.055
11. Bone	303,396,570	326.449.875	353.078.660
12. Soppeng	107,541,315	132.295.729	173.203.646
13. Wajo	222,453,502	242.197.691	247.041.994
14. Sidrap	115,829,872	150.608.676	229.621.369
15. Pinrang	193,223,043	152.864.980	219.530.778
16. Enrekang	130,511,548	176.027.258	219.571.336
17. Luwu	244,385,812	131.857.028	320.167.367
18. Tator	116,060,845	303.474.222	159.949.787
19. Luwu Timur	243,471,318	278.834.737	365.281.972
20. Luwu Utara	283,189,687	293.346.037	321.293.971
21. Toraja Utara	153,224,616	173.102.039	175.039.429
22. Makassar	810,499,462	1.004.098.614	1.333.224.530
23. Pare-Pare	182,501,030	207.125.190	252.805.003
24. Palopo	143,604,312	176.631.246	213.034.628
JUMLAH	4,921,169,247	5.540.477.074	6.940.066.389

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 2.14. Realisasi Pengeluaran/Belanja Modal Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	168,765,462	182.359.602	249.192.343
02. Bulukumba	218,960,709	325.437.878	317.310.979
03. Bantaeng	123,776,367	113.566.515	288.126.952
04. Jeneponto	149,574,852	273.345.115	348.633.175
05. Takalar	150,920,612	211.523.915	276.383.826
06. Gowa	379,683,313	385.801.162	291.273.487
07. Sinjai	157,488,435	195.122.366	300.713.564
08. Maros	297,822,399	325.693.299	368.172.663
09. Pangkep	305,729,438	404.953.048	410.300.515
10. Barru	120,446,082	149.060.035	228.492.468
11. Bone	209,579,371	304.197.876	320.949.024
12. Soppeng	166,093,334	225.924.896	281.820.149
13. Wajo	270,696,214	332.925.096	391.902.956
14. Sidrap	188,906,226	326.972.728	481.629.367
15. Pinrang	190,115,628	268.597.152	337.107.083
16. Enrekang	114,158,792	257.924.166	352.246.121
17. Luwu	164,321,480	208.465.033	400.764.437
18. Tator	183,491,379	223.382.859	303.971.980
19. Luwu Timur	322,077,624	385.063.008	580.264.819
20. Luwu Utara	112,280,864	16.302.283	199.310.427
21. Toraja Utara	183,352,542	178.680.332	204.928.438
22. Makassar	463,260,545	673.026.826	775.719.638
23. Pare-Pare	97,106,852	201.672.466	384.144.494
24. Palopo	96,423,169	137.225.875	339.717.474
JUMLAH	4,835,031,689	6.307.223.531	8.433.076.380

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 2.15. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 - 2016 (000 Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	62,929,486	63.779.260	500.000
02. Bulukumba	105.188.482	110.373.087	28.000.600
03. Bantaeng	8.586.049	35.851.728	344.652
04. Jeneponto	29,015,779	55.712.508	0
05. Takalar	118,589,018	284.782.185	3.000.000
06. Gowa	180,153,561	127.507.564	3.988.429
07. Sinjai	82,247,578	146.849.318	800.000
08. Maros	35,720,571	33.791.769	21.500.100
09. Pangkep	58,612,024	68.961.749	700.000
10. Barru	140,631,312	177.191.419	8.136.722
11. Bone	142,142,798	165.133.153	8.351.072
12. Soppeng	71,075,853	94.242.395	5.000.000
13. Wajo	188,093,750	210.014.086	5.184.501
14. Sidrap	9,337,859	32.227.748	3.752.000
15. Pinrang	114,714,751	111.392.886	0
16. Enrekang	104,214,841	89.134.705	11.229.474
17. Luwu	76,666,754	117.277.205	7.705.300
18. Tator	95,056,813	160.305.336	1.500.000
19. Luwu Timur	235,406,603	145.398.012	4.000.000
20. Luwu Utara	58,165,608	28.898.764	0
21. Toraja Utara	20,888,978	24.142.838	3.000.000
22. Makassar	263,980,098	148.515.331	4.000.000
23. Pare-Pare	120,035,442	167.836.612	5.725.075
24. Palopo	66,594,234	147.152.957	12.035.477
JUMLAH	2,388,048,242	2.746.472.615	138.453.402

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://sulsel.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Haji Bau No. 6 Makassar

Telepon : (0411) 854838; 872879 Fax : (0411) 851225

Email : bps7300@upandang.wasantara.net.id

Homepage : <http://sulsel.bps.go.id>